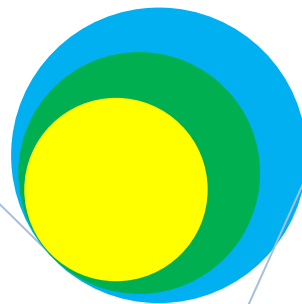




LAPORAN KINERJA OPD

KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN PEMALI
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah, SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja OPD ini disusun sebagai pertanggungjawaban apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan dapat menjadi bahan tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka baik langsung maupun tidak langsung, kritik serta saran yang bersifat membangun tetap kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan rencana kerja Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka di masa yang akan datang.

Akhir Kata, semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Pemali, Februari 2026

CAMAT PEMALI,

A circular official stamp of the Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Sukma Aditya'.

SUKMA ADITYA, S.STP

PEMBINA IV/a

NIP. 19850320 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	15
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi....	23
B. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV. PENUTUP	44

BAB I**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pemali selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Organisasi

1. Susunan Organisasi

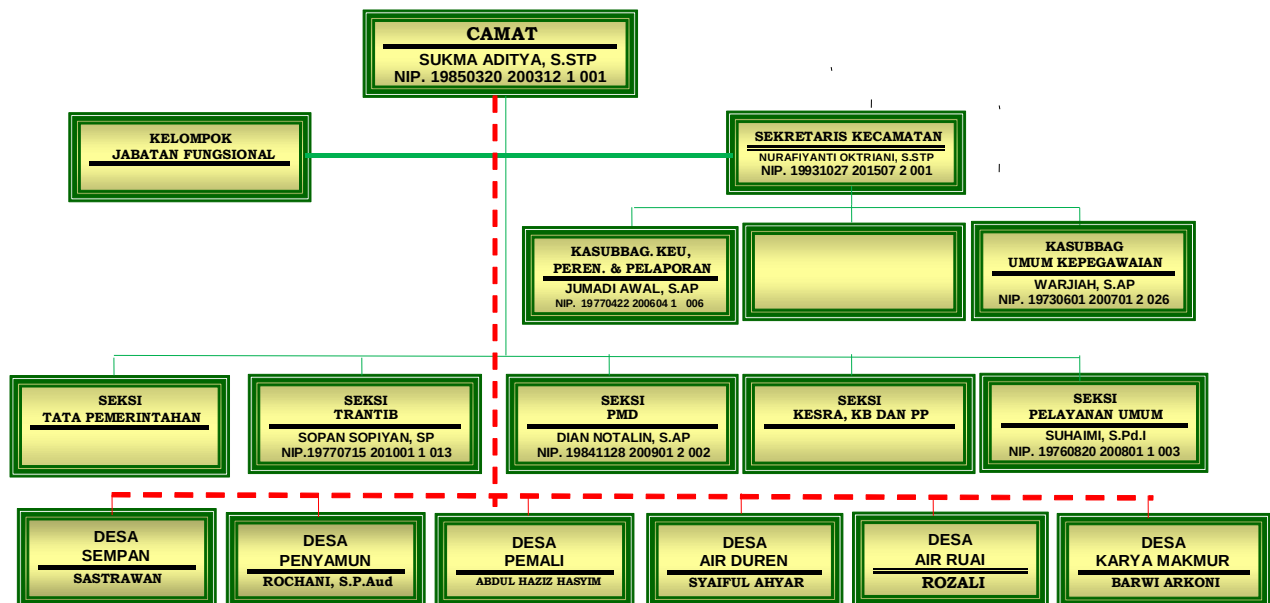
Kecamatan Pemali merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 6 (enam) desa : Desa Sempan, Desa Air Duren, Desa Pemali, Desa Penyamun, Desa Karya Makmur dan Desa Air Ruai, dimana dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka merupakan satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, pelapor dan pengawas yang terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang up to date dan akurat yang bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah kabupaten. Dalam pelaksanaan kegiatan OPD bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Tahun anggaran 2025 merupakan tahun kedua masa Renstra Peralihan periode 2024 - 2026, sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 diharapkan dapat menjadi indikator dalam memenuhi pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis OPD Kecamatan Pemali. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Lebih lanjut susunan organisasi kecamatan pemali digambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Pemali Tahun 2025



Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana

2. 1 Kondisi Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini OPD Kecamatan Pemali memiliki pegawai sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 14 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Pemali, 16 orang PPPK PW dan 1 orang outsourcing.

Latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, yang menggambarkan kondisi Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Kantor Kecamatan Pemali Kab. Bangka
per 31 Desember 2025**

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	1	5	-	6
Diploma	-	-	-	-	-
Strata 1	-	-	7	1	8
Strata 2	-	-	-	-	-
Total	-	1	12	1	14

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumah
Struktural :	7
a. Ess. II	-
b. Ess. III	2
c. Ess. IV	5
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	7
Fungsional :	0
Total	14

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kantor Kecamatan Pemali per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Komposisi PPPK PW dan Outsourcing Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Kantor Kecamatan Pemali Kab. Bangka
per 31 Desember 2025**

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Strata 1	Strata 2	
Penata Layanan Operasional	-	-	-	8	-	8
Operator Layanan Operasional	-	-	8	-	-	8
Outsourcing	-	-	1	-	-	1
Total	-	-	9	8	-	17

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	2
5	SPADA	-
6	ADUMLA	
7	ADUM	-
	Jumlah	3

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1
2	Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2
3	Diklat Bendahara Keuangan Daerah Kab. Bangka	2

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Pemali dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pemali**Per 31 Desember 2025**

NO	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat	
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-	-	
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	6	6	-	-	
4.	Personal Komputer	9	6	2	1	
5.	Air Conditioner (AC)	6	6	-	-	
6.	Kursi Putar	2	2	-	-	
7.	Mesin Tik	1	-	-	1	
8.	Sprayer	3	3	-	-	

9.	Filling Cabinet	10	10		-	
10.	Meja Kerja	17	13	4	-	
11.	Kursi Kerja	12	12	-	-	
12.	Kursi Rapat/Plastik	150	125	-	25	
13.	Meja Rapat/Panjang	1	1	-	-	
14.	Printer	18	13	2	3	
15.	Lemari Arsip	12	12	-	-	
16.	Teralis	79	79	-	-	
17	TV	2	2	-	-	
18.	Lampu Taman	25	-	-	25	
19	Mesin Asensi Elektronik	1	1	-	-	
20	GPS	3	2	-	1	
21	Mesin Genset	1	-	1	-	
22.	Kursi Tunggu	5	3	-	2	
23	In Focus	1	-	1	-	
24.	Meja Makan	1	-	1	-	
25	Sofa	1	1	-	-	
26	Pompa Air	-	-	-	-	
27	Brankas	1	1	-	-	
28	Mesin Potong Rumput	3	3	-	-	
29	Portable Wireless Loudspeaker	1	-	-	1	
30	Kalkulator	2	-	-	2	

31	Laptop	4	3	-	1	
32	Meja Komputer	3	3	-	-	
33	Almari Pakaian	1	-	1	-	
34	Kompor Gas	1	1	-	-	
35	Tabung Gas	1	1	-	-	
36	Gorden	1	1	-	-	
37	Tempat Tidur	2	1	1	-	
38	Papan Informasi data	1	1	-	-	
39	Papan Nama	5	5	-	-	

Jumlah peralatan di atas secara umum sudah cukup memadai, namun dari jumlah peralatan tersebut sebagian ada yang telah mengalami kerusakan bahkan ada beberapa peralatan yang hilang tetapi masih ada didaftar inventaris barang, selain itu ruang kerja kantor untuk menempatkan dan mengatur peralatan maupun menempatkan pegawai masih kurang memadai, dan kebutuhan operasional untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya difasilitasi 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat), juga kurang memadai.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dalam menyusun Laporan Kinerja bermaksud untuk dapat dijadikan :

- Bahan Evaluasi pelaksanaan sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya;
- Bahan untuk menentukan langkah- langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Kinerja Sasaran, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan di tahun-tahun berikutnya.

3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Pemali adalah:

- a. Sebagai laporan kinerja instansi Kecamatan Pemali dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD.
- b. Untuk mengetahui tingkat Capaian Target Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD ;
- c. Sebagai Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan OPD Kecamatan Pemali dalam satu tahun.

Tugas dan Fungsi

Kecamatan Pemali mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
3. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
4. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*serviceexceclent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyaikompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “*Pelayan Masyarakat*”.

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pemali dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor

Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

3. *Penataan Organisasi dan Manajemen Publik*

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. *Pengelolaan Keuangan dan Barang*

Kuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good*

Goverment di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalahmenata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Valuefor Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accuntabillity*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan.

Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan.
- (2) Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah,
- (3) Pengamanan barang daerah,
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Landasan Hukum

LAKIN Kecamatan Pemali ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka);

13. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama .

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan sebagai periode peralihan yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka masa Peralihan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan masa Pilkada Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dibuat pada masa peralihan, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tetap akuntabel.

Renstra Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bangka Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *Stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dimuat

program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan Organisasi

1.1. Tujuan Organisasi

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kecamatan Pemali dalam masa Peralihan adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Pemali dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan Hasil Pemetaan Peralihan rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Pemali sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja Kecamatan Pemali adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pemali dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah :

- a. Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP
- b. Persentase Desa Mandiri
- c. Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Tabel II.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	100	100	100
		1.2 Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	66,67	83,33	100
		1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain : Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan karena merupakan unsur pendukung rutin di Kecamatan.

Berikut ini Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemali :

Tabel II.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PEMALI
KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	(Jumlah Masyarakat yang dilayani dalam setahun dibagi Jumlah Masyarakat yang dilayani sesuai SOP) x 100	Kec. Pemali	
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	Untuk meningkatkan status desa dan masyarakat di wilayah kecamatan	DATA 2024 BERSUMBER IDM : KEC.PEMALI : 1. MANDIRI (AIR RUAI, AIR DUREN, PEMALI, KARYA MAKMUR) 2. MAJU (PENYAMUN DAN SEMPAN)		Klasifikasi Karakteristik Desa Mandiri : 1. Mandiri Ekonomi (Pertanian modern, UMKM, Pariwisata) 2. Mandiri Sosial (terpenuhinya akses pendidikan, kesehatan dan layanan publik) 3. Mandiri Lingkungan (Pengelolaan SDA Berkelanjutan) 4. Layanan Dasar dan Infrastruktur (Ketersediaan Pangan Sandang Papan) 5. Pemberdayaan (Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan masyarakat Efektif)

Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Peralihan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.3**PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PEMALI****TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	83,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	Kategori/ Nilai	BB (74,75)
No	Program	Anggaran (Rp)		Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.302.777.897,00		APBD

2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.150.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 45.072.225,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.150.000,00	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.650.000,00	APBD
JUMLAH		Rp.2.354.800.122,00	

Tabel II.4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**KECAMATAN PEMALI****TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	83,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	Kategori/ Nilai	BB (74,75)
No	Program	Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.302.777.897,00	2.280.987.081,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.150.000,00	2.150.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.072.225,00	27.740.000,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.150.000,00	2.150.000,00	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.650.000,00	2.050.000,00	APBD
JUMLAH		2.354.800.122,00	2.315.077.081,00	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Peralihan Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pemali.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1.	>100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	<100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra peralihan 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Camat Pemali Kabupaten Bangka, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran		Indikator
Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP
Sasaran 2	: Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri
Sasaran 3	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (outcome) sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator. Indikator Nilai Evaluasi AKIP kecamatan tidak termasuk dalam IKU, hal ini karena indikator tersebut merupakan pendukung rutin dilaksanakan OPD serta untuk Indikator yang terukur pada tahun 2025 dalam Renstra Peralihan 2024 – 2026 Kecamatan Pemali ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Kecamatan Pemali dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) Program yang dituangkan kedalam 10 (Sepuluh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan, dan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan antara lain :

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pemali maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 5 Program yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah 10 kegiatan, sebagai berikut :

- 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5 Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- 8 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 9 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 10 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah 17 sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (pada DPPA 2025)
- 7 Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8 Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
- 9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 12 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 13 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 14 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 15 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 16 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 17 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Tabel realisasi pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Pemali dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025							
OPD	: KECAMATAN PEMALI						
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BELANJA		HASIL/KELUARAN			KET
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
7.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,280,987,081	2,062,315,844				
7.01 . 01 . 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	1,728,225,045	1,550,675,717				
7.01 . 01 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,728,225,045	1,550,675,717				APBD
	<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang)</i>			14	14	orang	
7.01 . 01 . 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,050,000	19,790,000				APBD
7.01 . 01 . 2.05 . 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20,050,000	19,790,000				
	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapan (paket)</i>			4	3	paket	
7.01 . 01 . 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,844,446	109,477,058				
7.01 . 01 . 2.06 . 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16,260,800	16,260,768				APBD
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)</i>			12	12	Dokumen	
7.01 . 01 . 2.06 . 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56,282,400	55,234,127				APBD
	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>			12	12	Dokumen	
7.01 . 01 . 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107,682,335	87,760,850				
7.01 . 01 . 2.07 . 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	26,347,325	25,058,250				APBD, APBD-P
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)</i>			3	3	Paket	
7.01 . 01 . 2.07 . 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,335,010	62,702,600				
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>			16	16	Unit	APBD, APBD-P
7.01 . 01 . 2.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264,014,455	246,038,651				
7.01 . 01 . 2.08 . 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180,576,215	177,415,391				APBD
7.01 . 01 . 2.08 . 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,856,760	18,401,500				APBD
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			12	12	laporan	
7.01 . 01 . 2.08 . 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,581,480	50,221,760				APBD
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>			12	12	laporan	
7.01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49,170,800	48,573,568				
7.01 . 01 . 2.09 . 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,960,800	44,513,568				APBD
	<i>Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>			8	7	unit	
7.01 . 01 . 2.09 . 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,210,000	4,060,000				APBD
	<i>Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)</i>			8	8	unit	

7.01 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 02 . 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 02 . 2.02 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,150,000	2,150,000				APBD
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)			12	12	laporan	
7.01 . 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27,740,000	19,275,000				
7.01 . 03 . 2.01	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27,740,000	19,275,000				
7.01 . 03 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,100,000	4,845,000				APBD
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa (lembaga)			42	42	lembaga	
7.01 . 03 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22,640,000	14,430,000				APBD
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)			26	26	laporan	
7.01 . 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 04 . 2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 04 . 2.01 . 02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,150,000	2,150,000				APBD
	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)			12	12	laporan	
7.01 . 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,050,000	1,500,000				
7.01 . 06 . 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,050,000	1,500,000				
7.01 . 06 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	2,050,000	1,500,000				APBD
7.01 . 06 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	2,050,000	1,500,000				APBD
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)			140	140	dokumen	
JUMLAH		2,315,077,081	2,087,390,844				

➤ **Kinerja Sasaran Tahun 2025**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Bangka, Kecamatan Pemali menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagaimana yang tercantum pada Rencana Strategis Peralihan (Renstra SKPD) periode 2024-2026, tahun 2025 yang merupakan tahun kedua masa renstra peralihan periode 2024-2026, Kecamatan Pemali merencanakan 3 (tiga) sasaran agar dapat dilaksanakan pada tahun 2025, dari 3 (tiga) sasaran tersebut semua dapat diakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 dan tertera pada dokumen perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2025.

Lebih lanjut pencapaian sasaran yang dilihat dari pengukuran indikator sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

A. Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan potensi kecamatan yang ada. Pengukuran Kinerja sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut :

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator Persentase Desa Berkembang dengan tingkat capaian indikator Kinerja rata-rata mencapai 100 %.

B. Sasaran 2 :Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran ini ditujukan untuk memaksimalkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pembangunan masyarakat dengan pemanfaatan potensi desa yang ada. Pengukuran Kinerja sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut :

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Desa Mandiri	%	83,33	83,33	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator Persentase Desa Berkembang dengan tingkat capaian indikator Kinerja rata-rata mencapai 100 %

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan. Pengukuran Kinerja sasaran ini diukur melalui Indikator sebagai berikut :

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	kategori	BB	BB	100%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator untuk sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**, tingkat capaian indikator Kinerjanya 100 %.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Renstra 2025	
						Target	Capaian %
1.	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Desa Mandiri	%	83,33	83,33	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP, semua pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja pada indikator Persentase Desa Mandiri dimana definisi operasionalnya adalah (Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri dibagi Jumlah Seluruh Desa) x 100.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Peralihan 2024-2026.

Tahun 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Peralihan Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100
2.	Persentase Desa Mandiri	%	83,33	83,33	100
3.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (74,75)	BB (74,75)	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Kecamatan :

**PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/Melampaui Target	-
2.	Sesuai Target	100%
3.	Tidak Mencapai Target	-

Dari sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

PENCAPAIAN TARGET SASARAN

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	SASARAN 1	1	-		1	100	-	
2.	SASARAN 2	1	-		1	100	-	
JUMLAH		2	-		2	100	-	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan kinerja jangka panjang/jangka pendek.

Selanjutnya Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari Renstra, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra peralihan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian %
1.	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100

Pengukuran terhadap indikator diatas dapat dinyatakan tercapai 100% dengan asumsi bahwa kondisi zero pengaduan/keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

dimana output program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Menunjang / kurang	%
1	PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.150.000	2.150.000	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	Menunjang	100

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2025	100	100	Sangat Efektif

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	100	2.150.000	2.150.000	100	-

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan serta kompetensi SDM yang memadai;

Faktor Penghambat :

1. Sosial Budaya masyarakat, selama ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan masih sulit untuk langsung berhadapan dengan pelayanan kecamatan;
2. Kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam menyampaikan saran dan kritikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik;
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk selalu aktif dan membantu dalam proses peningkatan pelayanan prima;
3. Mampu memberikan solusi dan informasi kepada masyarakat dalam menghadapi kesulitan/kendala untuk data-data kelengkapan dalam pengurusan dokumen yang terkait pelayanan kecamatan;

Sasaran 2 : Persentase Desa Mandiri

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2 PERSENTASE DESA MANDIRI

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian %
1.	Persentase Desa Mandiri	%	83,33	100

Analisis pencapaian Indikator Persentase Desa Mandiri

Capaian kinerja nyata indikator presentase desa mandiri adalah sebesar 83,33% targetnya sebesar 83,33% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang dijanjikan.

KLASIFIKASI DESA MANDIRI

NO	KRITERIA	DESA					
		SEMPAN	AIR DUREN	PEMALI	PENYAMUN	KARYA MAKMUR	AIR RUAI
1.	Lokasi Tidak jauh dari kota/ kecamatan	±8 km	0 km	±1 km	±8 km	±6 km	±4,5 km
2.	Penduduk mulai padat	V	V	V	V	V	V
3.	Masyarakat tidak Terikat adat	30%	20%	30%	30%	10%	20%
4.	Memiliki fasilitas Memadai dan lebih maju	V	V	V	V	V	V

5.	Masyarakat kreatif Dan kritis	v	v	v	v	v	v
----	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan : semua desa di wilayah Kecamatan Pemali hampir memenuhi klasifikasi desa mandiri.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

dimana output semua program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

N o	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Menunja ng/ kurang	%
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.740.000	19.275.000	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan	Menunjang	69,48
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		
2	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.150.000	2.150.000	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Top a	Menunjang	100
3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.050.000	1.500.000	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	Menunjang	73,17

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran **PERSENTASE DESA MANDIRI** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran 2

Persentase Desa Mandiri

Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2025	100	71,77	Sangat Efektif

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran 2

Persentase Desa Mandiri

Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	100	31.940.000	22.925.000	71,77	0,39

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan kinerja penyelenggara tugas umum Pemerintahan Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;

Faktor Penghambat :

1. Sosial Budaya masyarakat, selama ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan masih sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan luar;
2. Kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pembangunan;
3. Kurangnya data dalam perencanaan awal pembangunan di desa;
4. Sulitnya kesadaran masyarakat untuk memahami data-data yang diperlukandalam merencanakan pembangunan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang berinteraksi;
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk selalu aktif dan membantu dalam pembangunan;
3. Mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam menghadapi kesulitan/kendala untuk data-data pembangunan;

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 3

HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian %
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	%	BB	100

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan

Analisis pencapaian Indikator Nilai Evaluasi AKIP

Capaian kinerja nyata indikator nilai evaluasi AKIP adalah BB dimana targetnya BB yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang dijanjikan.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dimana output program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

N o	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Menunjang/ kurang	%
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.728.225,045	1.550.675,717	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Menunjang	89,72
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.050.000	19.790.000	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Menunjang	98,70
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.844.446	109.477.058	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	Menunjang	97,88
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.682.335	87.760.850	Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Menunjang	81,49
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.014.455	246.038.651	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Menunjang	93,19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.170.800	48.573.568	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Menunjang	98,78

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2025	100	90,41	Sangat Efektif

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	100	2.280.987.081	2.062.315.844	90,41	0,10

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;
3. Kerjasama yang baik antara aparat

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang mengerti tentang Perencanaan dan Keuangan;
2. Kurangnya Pelatihan dalam Perencanaan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Mengajukan permohonan ke BKD untuk pendidikan dan pelatihan aparaturnya bidang pengelolaan keuangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Mengacu pada DPA dan DPPA SKPD Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran Kecamatan Pemali Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :



PEMERINTAHAN KAB. BANGKA
KECAMATAN PEMALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	2.315.077.081,00	2.087.390.844,00	90,17	1.987.188.757,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.207.944.746,00	1.999.629.994,00	90,57	1.987.188.757,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.681.605.045,00	1.510.715.717,00	89,84	1.380.693.384,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.339.701,00	488.914.277,00	92,89	606.495.373,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.207.944.746,00	1.999.629.994,00	90,57	1.987.188.757,00
5.2	BELANJA MODAL	107.132.335,00	87.760.850,00	81,92	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.132.335,00	87.760.850,00	81,92	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	107.132.335,00	87.760.850,00	81,92	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.315.077.081,00	2.087.390.844,00	90,17	1.987.188.757,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.315.077.081,00)	(2.087.390.844,00)	90,17	(1.987.188.757,00)

Belanja Operasi yang dianggar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025 diarahkan untuk melaksanakan program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

LAPORAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025							
OPD	: KECAMATAN PEMALI						
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BELANJA		HASIL/KELUARAN			KET
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
7.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,280,987,081	2,062,315,844				
7.01 . 01 . 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	1,728,225,045	1,550,675,717				
7.01 . 01 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,728,225,045	1,550,675,717				APBD
	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan (orang)			14	14	orang	
7.01 . 01 . 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,050,000	19,790,000				APBD
7.01 . 01 . 2.05 . 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20,050,000	19,790,000				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)			4	3	paket	
7.01 . 01 . 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,844,446	109,477,058				

7.01 . 01 . 2.06 . 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16,260,800	16,260,768				APBD
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)</i>			12	12	Dokumen	
7.01 . 01 . 2.06 . 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56,282,400	55,234,127				APBD
	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>			12	12	Dokumen	
7.01 . 01 . 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107,682,335	87,760,850				
7.01 . 01 . 2.07 . 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	26,347,325	25,058,250				APBD, APBD-P
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)</i>			3	3	Paket	
7.01 . 01 . 2.07 . 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,335,010	62,702,600				
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>			16	16	Unit	APBD, APBD-P
7.01 . 01 . 2.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264,014,455	246,038,651				
7.01 . 01 . 2.08 . 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180,576,215	177,415,391				APBD
7.01 . 01 . 2.08 . 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,856,760	18,401,500				APBD
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			12	12	laporan	
7.01 . 01 . 2.08 . 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,581,480	50,221,760				APBD
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>			12	12	laporan	
7.01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49,170,800	48,573,568				
7.01 . 01 . 2.09 . 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,960,800	44,513,568				APBD
	<i>Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>			8	7	unit	
7.01 . 01 . 2.09 . 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,210,000	4,060,000				APBD
	<i>Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)</i>			8	8	unit	Ac
7.01 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 02 . 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 02 . 2.02 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,150,000	2,150,000				APBD
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</i>			12	12	laporan	
7.01 . 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27,740,000	19,275,000				
7.01 . 03 . 2.01	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27,740,000	19,275,000				
7.01 . 03 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,100,000	4,845,000				APBD
	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa (lembaga)</i>			42	42	lembaga	Ac

7.01 . 03 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22,640,000	14,430,000				APBD
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)</i>			26	26	<i>laporan</i>	
7.01 . 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 04 . 2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,150,000	2,150,000				
7.01 . 04 . 2.01 . 02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,150,000	2,150,000				APBD
	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)</i>			12	12	<i>laporan</i>	
7.01 . 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,050,000	1,500,000				
7.01 . 06 . 2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,050,000	1,500,000				
7.01 . 06 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	2,050,000	1,500,000				APBD
7.01 . 06 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	2,050,000	1,500,000				APBD
	<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)</i>			140	140	<i>dokumen</i>	
JUMLAH		2,315,077,081	2,087,390,844				

Dengan data tersebut diatas dikatakan tahun 2025 serapan anggaran untuk OPD Kecamatan Pemali dapat dikatakan baik.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Tujuan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	2.315.077.081	2.087.390.844	90,16

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap terhadap capaian tujuan, sasaran Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, dapat diketahui dari capaian kinerja anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

**EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI (RP.)	%
	SASARAN	3			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-		2.087.390.844	90,17%
2.	Sesuai Target	3	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	-			

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kalau dilihat dari Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Pemali pada tahun anggaran 2025, semua Program dan Kegiatan yang dilaksanakan boleh dikatakan berhasil dalam pencapaian target yang telah ditentukan yaitu persentase rata – rata realisasi indikator kinerja sebesar 100%, begitu pula kalau dilihat dari tingkat serapan anggaran.

Kinerja SKPD Kecamatan Pemali pada tahun 2025 cukup memuaskan karena kami berasumsi bahwa pencapai target kinerja kami dasarkan pada pencapaian indikator kegiatan yang telah dilakukan yaitu pencapaian rata-rata sebesar 100%.

Rencana Tindak Lanjut

Setelah disusunnya laporan kinerja organisasi ini dan setelah dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan maka dapat di ambil rencana tindak lanjut :

1. Mempertahankan apa yang telah dicapai serta berusaha meningkatkan kinerja.
2. Menyusun dokumen perencanaan dengan baik.
3. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Pemali, Februari 2026

CAMAT PEMALI,



SUKMA ADITYA, S.STP

PEMBINA, IV/A

NIP. 19850320 200312 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKMA ADITYA, S.S.T.P.
Jabatan : CAMAT PEMALI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISNAINI
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN PEMALI
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	83,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (74,75)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.302.777.897	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.150.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.072.225	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.150.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.650.000	APBD
JUMLAH		2.354.800.122	





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKMA ADITYA, S.S.T.P.
Jabatan : CAMAT PEMALI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERY INSANI
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sungailiat, 07 November 2025

PIHAK KEDUA

FERY INSANI

PIHAK PERTAMA

SUKMA ADITYA, S.S.T.P.
PEMBINA
NIP.19850320 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : KECAMATAN PEMALI
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	83,33	83,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (74,75)	BB (74,75)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.302.777.897	2.280.987.081	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.150.000	2.150.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.072.225	27.740.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.150.000	2.150.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.650.000	2.050.000	APBD
JUMLAH		2.354.800.122	2.315.077.081	

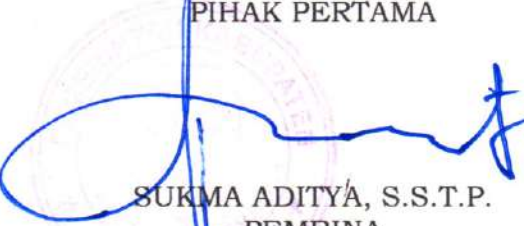
Sungailiat, 07 November 2025

PIHAK KEDUA



FERY INSANI

PIHAK PERTAMA



SUKMA ADITYA, S.S.T.P.
 PEMBINA
 NIP. 19850320 200312 1 001

REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN PEMALI

TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.95	82.95	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	Persentase	100	100	100
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	Persentase	100	100	100
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	Persentase	100	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	Persentase	83.33	83.33	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	Persentase	100	100	100
		Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase	100	100	100
2.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/Kec	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan	Persentase	100	100	100
		Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persentase	100	100	100
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	42	42	100
2.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	26	26	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Tratibum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	Persentase	97	100	100

[illegible]

